



Media: Koran Tempo

Hari: Selasa

Tanggal: 26 Juli 2016

Halaman: 22

Arena Bermain Pokemon Dilarang Pakai APBD

Bermain *Pokemon GO* tak
memerlukan biaya.

LN. Idayanie
idayani@tempo.co.id

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melarang dinas dan instansi lain menggunakan dana promosi wisata untuk menyediakan arena permainan *Pokemon GO*. "Anggaran daerah yang dikeluarkan untuk keperluan apa pun, termasuk promo wisata, harus tercatat dan terencana. Tak bisa serta-merta anggaran dikucurkan demi mengikuti tren yang booming, seperti *Pokemon GO*," ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, usai evaluasi anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta, kemarin.

Hingga kini, belum ada usul dari dinas, khususnya Dinas Pariwisata, soal pengajuan anggaran wisata untuk menyediakan tempat bermain *Pokemon GO*. Namun, tutur Kadri, pihaknya akan segera membahas jika ada usul pemanfaatan

permainan digital tersebut untuk mendongkrak jumlah wisatawan.

Sebelumnya, sejumlah obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi bermain *Pokemon GO*, dari pusat belanja, kebun binatang, sampai pantai menjadi Pokestop atau Pokegym.

"Ini kan masih euforia. Bagaimana kalau ternyata sudah dibiayai ternyata dampaknya buruk?"

— UNTUNG SUPRIYANTO
Anggota Badan Anggaran DPRD
Kota Yogyakarta

Pengelola Kebun Binatang Gembira Loka Kota Yogyakarta memanfaatkan permainan *Pokemon GO* untuk mendongkrak jumlah pengunjung. Menurut juru bicara Gembira Loka, Khriyanto Agung, pihaknya menyediakan 13 Pokestop di kebun binatang

sebagai lokasi bermain. "Kami beli Pokestop dari server resmi," ujar dia.

Pemain *Pokemon GO*, Albertus Indratno, mengatakan permainan digital tersebut tidak memerlukan biaya karena sepenuhnya dikelola oleh perusahaan pengembangnya, Nantic Inc. "Hutan Imogiri pun bisa menjadi lokasi berburu Pokemon. Sebab, penentuan lokasi sepenuhnya diatur oleh developer," tuturnya.

Menurut Albertus, suatu obyek bisa menjadi lokasi berburu Pokemon berdasarkan layanan Google Maps serta sesuai dengan penilaian pengembang dalam meletakkan layanan permainan ini. "Seperti jika lokasi ramai, sering dikunjungi, tidak hanya jadi Pokestop, tapi juga Pokegym," kata dia.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Untung Supriyanto, setuju atas sikap pemerintah. "Ini kan masih euforia. Bagaimana kalau ternyata sudah dibiayai ternyata dampaknya buruk? Yang disalahkan pemerintah karena malah membiayai," ujarnya.

● PRIBADI WIGAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005